

DIKOTOMI GENDER
(Sebuah Tinjauan Sosiologis)
Oleh: Rosdalina Bukido

ABSTRAK

Perempuan di arena publik maupun domestik, secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan klaminasi dalam berbagai variasi. Hal ini an tara lain inflasi bahkan nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dikotomi gender mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Rekonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, laki-laki dan perempuan. Persoalan subordinasi marginalisasi dan perempuan adalah persoalan masyarakat, persoalan bersama laki-laki dan perempuan. Mendingkan ketidakadilan struktural dan penindasan perempuan berarti melanggengkan dehumanisasi laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan dan penindasan perempuan, sementara perempuan mengalami dehumanisasi karena terus-menerus tertindas.

Kala Kunci : Gender

A. Pendahuluan

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks dan konsep gender. Sejak sepuluh tahun terakhir kata gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di Dunia ketiga.¹ Di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Secara konkrit bahwa masih terjadi ketidakjelasan, kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan usaha emansipasi kaum perempuan.

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks Jenis kelamin. Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditemukan secara biologis yang melekat, Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 7 pada jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin.² Secara biologis melekat pada manusia jerns perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat-alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Konsep lainnya adalah konsep gender, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut cantik emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.

Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan dari ciri-ciri itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. Misalnya saja zaman dahulu di suatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman yang lain dan di tempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Juga, perubahan bisa terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Di suku tertentu, perempuan kelas kemudian lebih kuat bahwa dibanding laki-laki. Semua hal yang di perkiraan antara sifat apa seperti apa yang bisa perempuan dan laki-laki ' berubah dari waktu

¹ Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 7

² Ibid., h.8

waktu, serta beda dari tempat tempat lainnya, maupun berbeda dari itu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sejarah perbedaan gender (*gender differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial yang melalui ajaran keagamaan maupun Negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Sebaliknya, melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan memengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya, karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif maka kaum laki-laki kemudian terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju kesifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarakat, yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya, karena kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh kepada perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga memengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, akhirnya menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender itu, seperti kaum perempuan lemah lembut dan kaum laki-laki kuat perkasa, dikonstruksi atau dibentuk oleh masyarakat atau kodrat biologis yang ditetapkan oleh Tuhan. Namun, dengan menggunakan pedoman bahwa setiap sifat biasanya pada jenis kelamin tertentu dan sepanjang sifat-sifat tersebut bisa dipertukarkan, maka sifat tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat, dan sarna sekali bukanlah kodrat.³

Dalam menjernihkan perbedaan antara seks dan gender ini, yang menjadi masalah adalah, terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender. Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Misalnya mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan

³ Indraswari, Makalah Dikotomi Gender Dalam Hukum Positif Indonesia, Bandung 20 Mei 2000

domestik sering dianggap sebagai "kodrat wanita".⁴ Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, apa yang disebut sebagai "kodrat wanita" atau "takdir Tuhan atas wanita" dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya, adalah gender.

B. Pembahasan

Gender dan Marginalisasi Perempuan Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequities*). Namun, yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut⁵. Untuk memahami bagaimana perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan gender, dapat dilihat melalui pelbagai manifestasi ketidakadilan yang ada. Ketidakadilan gender termanifestasikan di dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yakni: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) serta Sosialisasi ideologi nilai peran gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa dipisah-pisahkan, saling mermengaruhi secara dialektis. Tidak ada sanupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial, dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan itu menyumbang kepada subordinasi, kekerasan kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah

⁴ A. McEwen, Scott, *Women and Industrialisation: Examining the Female Marginalisation Thesis* dalam the *Journal of Development Studies*, no 22 (4), 1986, hal. 653

⁵ CEDAW (Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dalam APIK dan Ford Foundation, 1999, *Perisai Perempuan: Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, APIK dan Ford Foundation, Jakarta, 1999, hal. 157

menentukan dan terpenting dari yang lain dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (violence) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.

Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan ubord iriasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting perempuan dalam perspektif dengan laki-laki secara umum berada dalam posisi ter subordinasi, termarginalisasi dan mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Tersubordinasi, dalam arti berada dalam status yang lebih rendah, secara sosial, ekonomi, budaya, politik, dibandingkan dengan laki-laki. Marginalisasi perempuan berarti peminggiran perempuan, yang meliputi empat dimensi : 1) Marginalisation as exclusion from productive employment, 2) Marginalisation as concentration on the margins of the labour market 3) Marginalisation as feminization or segregation, 4) Marginalisation as economic inequality.

Diskriminasi berarti setiap perbedaan pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, Untuk penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.⁶

Sifat dan stereotipe yang sebetulnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial yang akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat yang panjang akhirnya telah mengakibatkan terkondisikannya beberapa posisi perempuan, antara lain:

1. Perbedaan dan pembagian gender yang mengakibatkan termanifestasikan dalam posisi subordinasi kaum perempuan dihadapan laki-laki. Subordinasi disini berkaitan dengan politik terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan.⁷

2. Secara ekonomis, perbedaan dan pembagian gender juga melahirkan proses marginalisasi perempuan. Proses marginalisasi perempuan terjadi dalam kultur, birokrasi

⁶ Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 151

⁷ Soetrisno, Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hal. 71

maupun program-program pembangunan. 3. Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk penandaan atau stereotipe terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe merupakan satu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni pemberian label yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat kepada posisi dan kondisi kaum perempuan. Misalnya stereotipe kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" sangat merugikan mereka. Akibatnya jika mereka hendak aktif dalam kegiatan yang dianggapnya sebagai bidang kegiatan laki-laki-seperti kegiatan politik, bisnis ataupun di pemerintahan, maka dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Sementara stereotipe laki-laki sebagai "pencari nafkah" mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai "sambi Ian atau tambahan" dan cenderung tidak dihitung, tidak dianggap ataupun tidak dihargai. 4. perbedaan dan pembagian gender juga membuat kaum perempuan bekerja lebih keras dengan memeras keringat jauh lebih panjang (*double-burden*).

Pada umumnya, jika dicermati, di suatu rumah tangga ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dan beberapa yang dilakukan oleh perempuan. Pada kenyataannya, dalam banyak observasi yang dilakukan, menunjukkan bahwa hampir 90% pekerjaan domestik dikerjakan oleh perempuan. Terlebih-lebih bagi mereka yang bekerja (umpamanya buruh industri atau profesi lainnya), artinya mereka memiliki peran ganda (beban kerja ganda di rumah dan di luar rumah). 5. Perbedaan gender tersebut juga melahirkan kekerasan dan penyalahgunaan (*violence*) terhadap kaum perempuan baik secara fisik maupun secara mental. Keberagaman bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan terjadi karena perbedaan gender muncul dalam berbagai bentuk. Yaitu yang bersifat fisik seperti pemerkosaan, persetubuhan antar anggota keluarga (*incest*), pemukulan dan penyalahgunaan, bahkan yang lebih sadis lagi pemotongan alat genital perempuan dan lain sebagainya. Kekerasan dalam bentuk nonfisik, yang sering terjadi misalnya pelecehan seksual, menyebabkan ketidaknyamanan bagi perempuan secara emosional. Perbedaan dan pembagian gender dengan segenap manifestasinya di atas, mengakibatkan tersosialisasinya citra posisi, kodrat dan penerimaan nasib perempuan yang ada.

Dengan kata lain segala manifestasi ketidakadilan gender itu sendiri juga merupakan proses penjinakan (*cooptation*) peran gender perempuan, sehingga kaum perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati. Jadi tersebut ternyata keseluruhan manifestasi saling berkaitan dengan tergantung serta saling menguatkan satu sama yang lain.

Pelanggengan posisi subordinasi, stereotipe dan kekerasan terhadap kaum perempuan ini secara tidak sadar juga diciptakan oleh ideologi dan kultur patriarki: yakni ideologi kelelakian. Ideal ini ada di kalangan kaum laki-laki dan perempuan. Semua kondisi terutama "saling dukung" satu sama lain mengakibatkan berbagai kerugian yang ditanggung perempuan.

Ironisnya kerugian tersebut seringkali "tersembunyi" dianggap bukan masalah, bahkan dianggap sebagai "kodrat perempuan". Dengan memunculkan terminologi "kodrat-perempuan pun mandeg karena faktor kodrat tersebut. Terdapat kecenderungan bahwa istilah kodrat selalu diperuntukkan bagi perempuan dan istilah martabat dialamatkan pada laki-laki." Dengan memakai istilah martabat kita telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai porsi untuk maju ke segenap kemungkinan, sedangkan kalau kita tetap menggunakan istilah kodrat sepertinya manusia ini terjebak di dalam keadaan baku yang tidak bisa diubah, kodrat seakan-akan membatasi ruang gerak manusia itu sendiri. Walaupun istilah kodrat tetap digunakan, maka kodrat perempuan harus dibatasi hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi biologis perempuan yang hamil, melahirkan, dan menyusui.

Dikotomi Gender vs Dikotomi Publik-Domestik

Pembedaan peran sosial laki-laki dan perempuan seringkali mencari pembenaran, melalui perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memiliki alat dan fungsi reproduksi yang berbeda. Perbedaan ini kemudian melahirkan perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Karena perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui (reproduksi biologis), maka perempuan dipandang sudah seharusnya bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak (reproduksi sosial) dan selanjutnya melebar ke seluruh hal di lingkup domestik. Sementara itu, laki-laki dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab "menanggung" perempuan (dan anak-anak), sehingga tempat laki-laki adalah sektor publik.

Dikotomi publik-domestik ini secara teoritis seharusnya tidak menjadi masalah baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada tingkat praktis, dikotomi tersebut melahirkan kerugian dan ketidakadilan bagi perempuan.

Pertama, dunia publik, adalah dunia yang dengan jelas menetapkan sejumlah peraturan, dengan menggunakan ukuran-ukuran rasional. Sementara itu, dunia domestik tidak

memiliki aturan yang baku, dianggap "alamiah dan "cenderung emosional. Semua yang berlangsung di lingkup domestik dianggap sudah terberi seperti apa adanya. Pemikiran tersebut mengakibatkan masalah-masalah yang muncul dalam dunia domestik tidak dianggap masalah dan tidak dianggap penting. Contohnya kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak muncul ke permukaan. Jika persoalan tersebut mencuat ke permukaan, seringkali masalah tersebut dianggap "masalah suami isteri" atau masalah intern keluarga.

Kedua, bidang domestik tidak mendapatkan penghargaan yang memadai seperti halnya bidang publik. Meskipun ibu rumah tangga seringkali diibaratkan "ratu" rumah tangga, pekerjaan rumah tangga (domestik) adalah pekerjaan "mulia namun dalam "kenyataan puja-puji tersebut lebih merupakan hiasan bibir belaka dan tidak berkorelasi dengan penghargaan riil terhadap bidang domestik. Hal ini diindikasikan dengan kecenderungan keengganan laki-laki untuk terlibat dalam bidang domestik. Ketiga, dikotomi publik-domestik, dianggap "kodrat sesuatu yang sudah baku dan tidak bisa diubah. Seluruh komponen masyarakat (keluarga, lembaga pendidikan, media massa) memperkuat anggapan tersebut dengan cara langsung atau tidak langsung menyosialisasikan bahkan tugas perempuan adalah di lingkup domestik, sementara tugas laki-laki adalah di lingkup publik. Miil mengatakan "seperti seorang laki-laki ketika ia memilih sebuah profesi, demikian pula halnya seorang perempuan memilih untuk menikah. Dapat dikatakan bahwa ia telah membuat pilihan untuk mengurus rumah tangga, keluarga, merupakan panggilan tugasnya dalam sebagian besar hidupnya dan ia akan menilai segala pekerjaan lainnya yang tidak konsisten dengan tugasnya." Sebagaimana halnya Arivia (1999:9), dalam pandangan penulis, membandingkan seorang perempuan yang masuk dalam perkawinan adalah seperti seorang laki-laki yang masuk dalam pekerjaan adalah perbandingan yang tidak adil dan tidak berdasar.

Selanjutnya pada tinjauan makro, dikotomi publik domestik melahirkan ketidakadilan struktural yang mengakibatkan perempuan ter subordinasi, termarginalisasi, dan terdiskriminasi, baik di sektor publik maupun di sektor domestik.

Perempuan di Sektor Publik

Meskipun di tingkat ideologis, sektor publik merupakan domain laki-laki, namun tidak dapat disangka keterlibatan perempuan di sektor tersebut menunjukkan kecenderungan

meningkat dalam waktu ke waktu.⁸ Meskipun secara absolut tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih besar dibandingkan laki-laki, namun secara relatif tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat lebih cepat dibandingkan selama kurun waktu 1980-1990, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat sebanyak 50% sementara tingkat partisipasi angka terjadi secara meningkat sebanyak 35,5% (sensus penduduk 1980 dan 1990). Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh tuntutan ekonomi, peningkatan pendidikan perempuan dan makin terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor publik.

Perempuan bekerja mencari nafkah karena tuntutan ekonomi lazim ditemui di berbagai kelompok masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa perempuan dan kerja publik sebenarnya bukan hal baru bagi perempuan Indonesia terutama mereka yang berada pada strata menengah ke bawah di pedesaan, perempuan pada strata ini mendominasi sektor pertanian, sementara di perkotaan sektor industri tertentu didominasi oleh perempuan. Di luar konteks di kota, sektor perdagangan juga banyak melibatkan perempuan.⁹ Data sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah sektor yang terbesar dalam menyerap tenaga kerja perempuan yaitu 49, oleh sektor perdagangan 20,6%, dan sektor industri manufaktur 14,2%.

Terlepas dari persoalan sektor yang digeluti perempuan, keterlibatan perempuan di sektor manapun dicirikan oleh "skala bawah" dari pekerjaan perempuan. Perempuan di sektor pertanian pedesaan, mayoritas berada di tingkat buruh tani. Perempuan di sektor industri perkotaan terutama terlibat "bagi buruh industri tekstil, garmen, sepatu dan elektronik. Di sektor perdagangan, pada umumnya perempuan terlibat dalam perdagangan skala kecil (petty trade). Pedagang sayur mayur di pasar tradisional, usaha warung, adalah jenis-jenis yang lazim ditekuni perempuan.

Jika perempuan pada strata menengah ke bawah, terjun ke sektor publik dengan pendorong utama adalah faktor ekonomi, maka bagi perempuan di kelas menengah ke atas, keterlibatan mereka di sektor publik-selain karena dorongan ekonomi-banyak pula merupakan kombinasi antara faktor ekonomi dan keinginan untuk mengamalkan bekal

⁸ Gadis Arivia, *Kekuatan dan Kekuasaan Kaum Ibu*, dalam *Suara Ibu Peduli*, Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 1999, hal. 9

⁹ Indraswari, Thamrin, *Potret Kerja Buruh Perempuan - Tinjauan pada Agroindustri Tembakau Ekspor di Jember*, Akatiga - Pusat Analisis Sosial, Bandung, 1999, hal. 52

pendidikan yang dimiliki, selain juga makin terbukanya peluang bagi perempuan untuk memasuki sektor-sektor pada awalnya diperuntukkan hanya untuk laki-laki.¹⁰

Semakin banyaknya perempuan berpendidikan yang berkeinginan untuk aktif di sektor publik merupakan konsekuensi logis dari pembukaan peluang yang lebih besar bagi anak perempuan untuk bersekolah.

Masalah umum yang dihadapi perempuan di sektor publik adalah kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis pekerjaan yang berupa rendah, kondisi kerja buruk dan tidak memiliki kestabilan kerja. Dengan kata lain telah terjadi *marginalization as concebration on the margins of the labour market* hal ini berlaku khususnya bagi perempuan berpendidikan menengah ke bawah. Untuk kasus urban, sebagai buruh pabrik, sementara untuk kasus pedesaan sebagai buruh tani. Hal yang perlu digarisbawahi disini adalah cara (kecenderungan perempuan terpinggirkan pada pekerjaan marginal tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor pendidikan. Dari kalangan pengusaha sendiri, terdapat preferensi untuk mempekerjakan perempuan pada sektor tertentu dan jenis pekerjaan tertentu karena upah perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebuah studi tentang buruh perempuan pada industri sepatu di Tangerang, menemukan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki "dirilis 8 Juli-Desember 71 adalah 10-15 % dari sementara bi lari total biaya produksi. perempuan, biaya" mempekerjakan ditekan hingga 5-8 tenaga kerja dapat produksi total biaya dalam kasus tersebut, (Tjandraningsih, 1991:18).

Perempuan adalah presentase buruh 90 % dari total buruh. Buruh perempuan pada agro industri tembakau ekspor di Jember bahwa untuk pekerjaan di kebun tembakau buruh perempuan mendapat upah Rp. 650,00 per hari sementara buruh laki-laki mehdapat upah Rp.1.850,00 perhari." Presentase buruh perempuan pada kasus tembakau adalah 80%.paling tidak di kedua kasus tersebut telah terjadi *marginalization as feminization for segregation*. Feminisation adalah penggunaan tenaga kerja perempuan untuk sektor-sektor produktif tertentu. Segregation adalah pemisahan kegiatan-kegiatan tertentu atas dasar jenis kelancaran. Derajat feminization dan segregator dapat dilihat melalui peningkatan atau penurunan rasio perempuan di setiap jabatan.

¹⁰ Verania Andria, Reychman Katarina, Dampak Krisis terhdaap Perempuan Miskin Perkotaan di Kota Bandung - Perempuan sebagai Pengelola Rumah Tangga Miskin, Akatiga - Pusat Analisis Sosial, Bandung, 1999, hal. 9

Bagi perempuan kelas menengah ke atas yang bekerja sebagai pegawai swasta maupun sebagai pegawai diskriminasi upah sengketa tersamar. Meskipun sistem pengupahan (termasuk tunjangan) pegawai negeri tidak lagi membedakan pegawai perempuan dan laki-laki, di sektor swasta diskriminasi masih terjadi. Meskipun besar upah pokok antara pegawai laki-laki dan perempuan sama, namun komponen tunjangan keluarga dan tunjangan kesehatan dibedakan antara pegawai perempuan dan laki-laki.

Seorang pegawai perempuan apakah berstatus menikah atau lajang-tetap dianggap lajang. Seorang pegawai perempuan yang berstatus menikah karena dia perempuan-tidak mendapat tunjangan suami/anak. Demikian pula tunjangan kesehatan hanya diberikan kepada dirinya sendiri tidak untuk suami dan anak. Dengan demikian - dengan memperhitungkan komponen tunjangan - total penghasilan pegawai laki-laki dan perempuan berbeda jumlahnya untuk pekerjaan yang sama.

Diskriminasi upah yang terjadi secara eksplisit maupun implisit, sering kali memanipulasi ideologi gender sebagai pembenaran. Ideologi gender adalah segala aturan nilai stereotipe, yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki terlebih dahulu melalui pembentukan identitas feminin dan maskulin. Karena tugas utama perempuan adalah di sektor domestik, maka pada saat ia masuk ke sektor publik "sah-sah" saja untuk memberikan upah lebih rendah karena pekerjaan sektor publik hanya sebagai "sampingan" untuk "membantu" suami. Persoalannya, overgeneralisasi bahwa "*suatu perempuan bekerja hanya untuk "membantu suami " atau " semua perempuan bekerja hanya sebagai kegiatan sampingan"*" banyak tidak terbukti validitasnya. Bagi perempuan miskin, dalam situasi krisis ekonomi, banyak perempuan menjadi pencari nafkah utama keluarga atau bersama-sama suami memberikan kontribusi finansial hingga 50% dari total penghasilan keluarga atau bahkan lebih. Sebenarnya pihak yang diuntungkan dalam kasus diskriminasi upah adalah minimal yang dapat menekan biaya produksi melalui pengurangan komponen biaya tenaga kerja.

Selain persoalan upah, dalam perspektif perbandingan dengan laki-laki, perempuan di sektor publik menghadapi kendala lebih besar untuk melakukan mobilitas vertikal (kenaikan pangkat, posisi, jabatan) karena ideologi patriktis yang dominan. Hal ini diindikasikan dengan minimnya jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil keputusan dan posisi strategis lainnya baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta.

Dari deskripsi persoalan diatas, dapat dilihat telah terjadi pula marginalization as economi inequality yaitu pelebaran ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan yang diindikasikan oleh perbedaan upah serta ketidaksamaan akses keuntungan dan vasilitas kerja, termasuk akses terhadap program-program pelatihan untuk pengembangan karir.

Perempuan di Sektor Domestik

Selama beratus-ratus tahun pekerjaan domestik mengasuh anak, mencuci, membersihkan rumah, memasak, merupakan tanggung jawab perempuan. Masyarakat Indonesia, dengan struktur sosial patriarkis menempatkan perempuan di wilayah rumah dengan tanggung jawab sebagai pengelolah rumah tangga yang meliputi tiga hal yaitu makanan, kesehatan dan pendidikan anak." Perempuan juga bertanggungjawab mengatur pemasukan dan pengeluaran keluarga, sementara laki-laki bertanggung jawab mencari uang dengan bekerja di luar rumah.

Dilihat dari sisi curahan tenaga, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang benar-benar menyita energi fisik dan psikis perempuan. Sedangkan dari sisi waktu, sebuah studi mengungkapkan bahwa rata-rata seorang ibu menghabiskan waktu 50 jam per minggu untuk pekerjaan rutin rumah tangga, atau dengan rata-rata 10 jam kerja dengan pekerjaan rumah tangganya tidak ada habisnya, mulai menyerang mereka saat bangun tidur hingga larut malam.¹¹

Pertama, pelecehan pekerjaan rumah tangga. Meskipun secara riil seorang ibu mencurahkan banyak waktu dan energi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, namun penghargaan yang diterima minim sekali. Yang sering terjadi adalah pekerjaan rumah tangga dianggap "bukan pekerjaan "produktif, dan dipandang sebelah mata. Akibat selanjutnya mudah ditolak, banyak perempuan yang sepenuhnya berprofesi sebagai ibu rumah tangga merasa rendah diri, yang sering kali diungkapkan dengan ekspresi 'saya hanya ibu rumah tangga biasa". Kedua, labelisasi pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan wajib bagi perempuan (ibu rumah tangga dan bahwa ia dituntut untuk bekerja selaku sebagaimana umumnya dikehendaki masyarakat (Arivia, 199 :25). Artinya ia harus memenuhi kriteria "keibuannya patuh "pada suami, menjaga anak dengan baik dan menganggap bahwa pekerjaan yang tidak dibayar ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut dianggap "menyimpang" dan bukan ibu yang baik.

¹¹ Ibid., hal.8

Ketiga, pekerjaan rumah tangga yang nyaris 100 % dibebankan kepada perempuan, mengakibatkan perempuan terisolasi dari kehidupan sosial dan menghambat pengembangan diri perempuan. Domestikasi (*housewifisation*) perempuan menggambarkan bagaimana perempuan diberi tanggung jawab mulia untuk membuat rumah menjadi tempat yang nyaman bagi generasi berikutnya, memberikan batasan ruang gerak perempuan hanya di arena domestik saja. Deskripsi perempuan di sektor publik dan domestik, memberikan gambaran situasi tertekan yang dialami perempuan di kedua arena tersebut. Situasi bertambah runyam bagi perempuan yang karena berbagai alasan, harus terjun di kedua arena tersebut. Bukan hanya peran ganda yang ditanggung perempuan, melainkan beban ganda. Dalam pandangan penulis, istilah "peran ganda perempuan" yang sering kali digembar-gemborkan pemerintah orde baru hanya merupakan penghalusan dari beban ganda yang ditanggung perempuan karena perempuan secara tidak proporsional dituntut untuk bertanggungjawab penuh di kedua arena publik dan domestik.

C. Kesimpulan

Perempuan di berbagai strata, di arena publik maupun domestik, secara umum mengalami subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi dalam berbagai variasi. Hal ini antara lain disebabkan nilai-nilai sosial budaya yang menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua, yang menempatkan perempuan dalam tatus lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Dalam derajat tertentu, dikotomi gender yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam konteks "kaku" publik-domestik, juga mengakibatkan posisi perempuan semakin terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Rekonstruksi peran gender perempuan dan laki-laki merupakan hal penting yang perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat, laki-laki dan perempuan. Persoalan subordinasi, marginalisasi, dan diskriminasi perempuan adalah persoalan masyarakat, persoalan bersama laki-laki dan perempuan. Mendingkan ketidakadilan struktural dan penindasan perempuan berarti melanggengkan dehumanisasi laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggengkan ketidakadilan dan penindasan perempuan, sementara perempuan mengalami dehumanisasi karena terus-menerus tertindas.

Daftar Pustaka

Andria, Verania dan Reychman, Katarina, 1999, Dampak Krisis terhadap Perempuan Miskin Perkotaan do Kota Bandung-Perempuan sebagai Pengelola Rumah Tangga Miskin, , Bandung: Akatiga-Pusat Analisis Sosial

Arivia, GadiS. Pemberontakan Ruang Publik, dalam suara Ibu Peduli, 1999, Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan -----, Kekuatan dan Kekuasaan Kaum Ibu, dalam Suara Ibu Peduli, 1999, Catatan Perjalan an Suara Ibu Peduli, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), 1999, dalam APIK dan Ford Foundation, 1999.

Indraswari dan Thamrin, Juni, 1994, Potret Kerja Buruh Perempuan - Tinjauan pada Agroindustri Tembakau Ekspor di Jember, Bandung: Akatiga-Pusat Analisis Sosial

Scott, A. McEwen, 1986, Women and Industrialisation: Examining the Female Marginalisation Thesis dalam The Journal of Development Studies, no 22 (4)